



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2013 Halaman
<http://www.fisipundip.ac.id>

PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNDIP TERHADAP DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Oleh :

(Jane Theresia Silaban¹, Yuwanto, Ph. D², Lusia Astrika, M.Si²)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In reaching the whole system of democratic government, Indonesia has undertaken the process of democratization (the transition, consolidation, and maturing political culture community). This background has been made in this study. Problems that arise: How do students' perceptions of the Faculty of Social UNDIP about democratization in Indonesia?

The purpose of this study was to describe the perceptions of students FISIP UNDIP about democratization in Indonesia. The data was collected through questionnaires with a population of as many as 3083 students of Faculty of Social UNDIP and total sample of 100 students of Faculty of Social UNDIP. This type of research is descriptive quantitative research.

The analysis showed that the democratic system is in conformity with the system of government in Indonesia. College students who are part of the public have confidence that the ongoing democratization in Indonesia has done well but not convinced that democratization in Indonesia (with the implementation of the transition and consolidation) have been able to improve the socio-economic conditions of society and makes government of Indonesia to be better.

Recommendations from this study are (i) For the government: provide early education about the system politic, providing open space for society, more transparent and accountable in the implementation of the system of government. (ii) For the community: makes democracy as a way of life that guides the livelihood of the nation, more caring and actively participate in the political system in Indonesia. (iii) For college students: waged back the fighting spirit in defending the fate of nations, revive its role as an Agent of Change to give change for the people and government of Indonesia (by not doing harm to others).

Keywords: Perseption, Democratization and College Student

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berbentuk republik yang menganut sistem demokrasi, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai suatu sistem, demokrasi memiliki unsur-unsur yang membuatnya eksis dan tegak di dalam sebuah negara. Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain: Negara Hukum, Masyarakat Madani, Instrastruktur Politik (partai politik), dan Pers yang bebas dan bertanggung jawab¹. Sedangkan prinsip pemerintahan yang demokrasi itu sendiri adalah adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*), supremasi hukum atau pemerintahan berdasarkan hukum (*law supremacy* atau *rule of law*), serta kesederajatan (*equality*) dan kebebasan (*liberty*)². Prinsip tersebut dilakukan agar tidak terjadinya tindak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh setiap institusi maupun individu, selain itu juga agar dapat memberikan kebebasan dan keadilan secara merata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mewujudkan sebuah sistem yang demokrasi, Indonesia telah mengalami sebuah proses demokrasi atau yang disebut dengan demokratisasi. Demokratisasi di Indonesia dimulai setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998, yang merupakan sebuah masa transisi dari pergantian masa orde baru (yang dipimpin oleh Soeharto) menuju orde reformasi (yang dipimpin oleh Habibie). Pergantian masa tersebut diakibatkan oleh penolakan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto yang otoriter dan terjadinya stagnasi atau kegagalan ekonomi yang memperburuk keadaan perekonomian rakyat sehingga mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Untuk dapat memperbaiki kondisi Indonesia yang kacau balau, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut, diantaranya adalah melakukan pergantian rezim (masa transisi) dan konsolidasi, yaitu suatu tindakan untuk menguatkan sistem pemerintahan dengan melakukan perbaikan terhadap UUD 1945 (ideologi negara) sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 3 tahun (1999-2002), perbaikan terhadap lembaga-lembaga demokrasi (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), serta terlaksananya pemilihan umum yang telah berlangsung sebanyak 3 kali setelah masa reformasi (1999, 2004, 2009).

Setelah masa reformasi 1998, Indonesia telah melaksanakan demokrasi terbuka, otonomi daerah, dan kebebasan pers³, namun ternyata masih belum dapat

¹Demokrasi Indonesia. Dalam www.courseware.politekniktelkom.ac.id diunduh pada tanggal 4 Mei 2013 pada pukul 16.25 WIB

² Muhadam Labolo, dkk. (2008). *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 530.

³ Azyumardi Azra. Dalam www.republika.co.id diunduh tanggal 16 Mei 2013 pada pukul 17.35 WIB

memperbaiki kondisi masyarakat secara keseluruhan yang dikarenakan belum tercapainya tujuan demokrasi.

Belum tercapainya tujuan demokrasi sebenarnya dikarenakan masih adanya kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Walaupun pemerintah telah melakukan konsolidasi terhadap lembaga-lembaga, struktur maupun sistem politik di Indonesia, namun pemerintah masih belum dapat melakukan konsolidasi terhadap kultur atau budaya politik di Indonesia. Budaya politik itu sendiri menurut Almond & Verba adalah sikap-sikap individu terhadap peran mereka sendiri di dalam sistem politik, sehingga bagaimana pemerintah mensosialisasikan sistem yang demokratis terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengerti akan peran mereka terhadap sistem politik dan ikut berpartisipasi secara aktif di dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan konsolidasi terhadap budaya politik di Indonesia diakibatkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat diakibatkan oleh kurang efektifnya kinerja pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menentukan dan melaksanakan keputusan kebijakan publik, pemberian pelayanan publik, serta dalam upaya penegakan hukum.

Apabila pemerintah tidak dapat menanggulangi permasalahan tersebut maka pemerintah juga tidak dapat meningkatkan budaya politik di Indonesia yang akan mengakibatkan tidak dapat berjalannya pemerintahan yang demokrasi. Karena pemerintahan yang demokrasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (yang merupakan aktor politik) terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan.

Demokrasi yang dianggap merupakan sebuah sistem pemerintahan yang paling baik untuk Indonesia, karena memberikan kedaulatan sepenuhnya terhadap masyarakat, namun ternyata tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap demokratisasi di Indonesia yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dianggap perlu untuk dikaji, karena masyarakat merupakan aktor utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga perlu diketahuinya persepsi dari masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat merupakan suatu komunitas terbesar di dalam suatu negara, maka salah satu bagian dari komunitas tersebut adalah mahasiswa.

Mahasiswa yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia memiliki peranan penting dalam mengaspresiasi suara rakyat kepada pemerintah. Sehingga mahasiswa Indonesia harus dapat memahami lebih kritis terhadap proses demokrasi atau demokratisasi di Indonesia dengan tidak memiliki keterikatan terhadap ideologi suatu golongan maupun kelompok tertentu, karena mahasiswa merupakan kaum yang intelektual.

Mahasiswa yang merupakan kaum intelektual dan merupakan penerus bangsa harus dapat memberikan partisipasinya dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sehingga dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh sebab itu perlu diketahui pandangan mahasiswa terhadap sistem pemerintahan Indonesia, apakah mereka memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah atau melainkan memiliki keraguan terhadap kinerja pemerintah? Karena apabila dari mahasiswa itu sendiri memiliki keraguan yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan tata kelola pemerintahan, bagaimana dengan masyarakat itu sendiri? Maka dari itu perlu adanya peninjauan lebih lanjut terhadap persepsi masyarakat melalui mahasiswa (yang merupakan bagian dari masyarakat) untuk dapat mengutarakan pandangan mereka, guna mendapatkan jawaban agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan menganut sistem demokrasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud meneliti masalah **“Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Terhadap Demokratisasi di Indonesia”**

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa FISIP UNDIP terhadap demokratisasi di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimanakah persepsi mahasiswa FISIP UNDIP terhadap demokratisasi di Indonesia.

C. Kerangka Teori

1) Persepsi

Persepsi adalah inti dari komunikasi. Sedangkan penafsiran (*interpretasi*) adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Hal ini jelas tampak menurut Cohen (1994) dalam Mulyana (2001) bahwa persepsi didefinisikan sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal serta pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana. Ahli komunikasi lain (De vito, 1997) mendefinisikan persepsi sebagai proses dengan mana seseorang menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indranya. Persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) atau pesan apa yang diserap dan apa makna yang diberikan kepada seseorang ketika orang tersebut mencapai kesadaran⁴.

Persepsi seseorang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya pengalaman, proses belajar, wawasan serta pengetahuan individu. Faktor pengalaman dan proses

⁴ Taher, Alwin. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Kesadaran Gender*. Dalam <http://repository.ipb.ac.id>. Diunduh pada tanggal 2 Mei 2013 pada pukul 17.25 WIB.

belajar akan memberi bentuk terhadap apa yang dilihat, didengar dan dirasakan, sementara wawasan dan pengetahuan individu akan memberikan arti terhadap obyek psikologis. Menurut Young (1956) persepsi merupakan aktifitas mengindra, mengintegrasikan, dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Mar'at (1981) mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya⁵.

2) Demokrasi

i. Definisi Demokrasi

Menurut makna katanya demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat (*demos* = rakyat, *kratein* = tata pemerintahan)⁶. Ketika Abraham Lincoln menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal di Gettysburg di tahun 1863, secara sederhana ia menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Akan tetapi, kalau diteliti lebih mendalam, inti dari demokrasi itu adalah pemerintahan “oleh rakyat”. Alasannya karena semua pemerintahan, apapun bentuknya, pasti berasal dari rakyat (tak seorangpun di antara mereka yang memerintah yang bukan berasal dari rakyat) dan karena sebuah pemerintahan yang otoriter bisa juga berbuat baik untuk kepentingan rakyat (biasanya disebut *benevolent authoritarian regime*). Jadi, hanya pemerintahan oleh rakyatlah yang murni mencerminkan demokrasi⁷.

Demokrasi terjadi akibat dari adanya penolakan maupun pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter untuk dapat menggantikannya dengan pemerintahan yang lebih mementingkan nasib rakyatnya yaitu demokrasi. Penolakan dilakukan karena masyarakat menganggap bahwa sistem demokrasi merupakan suatu sistem yang dapat mementingkan masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan ruang yang lebih terbuka untuk dapat mengekspresikan keinginan mereka dan diharapkan dapat menciptakan kehidupan politik yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selain akibat dari rezim yang otoriter, demokrasi juga dapat disebabkan oleh stagnasi ekonomi atau kegagalan ekonomi yang mengakibatkan memburuknya keadaan perekonomian suatu negara dan meningkatnya tingkat kemiskinan. Sehingga dengan demikian, sistem pemerintahan yang demokratis merupakan sebuah jawaban untuk dapat memperbaiki kondisi sebuah negara yang sedang mengalami permasalahan tersebut.

⁵ Rina Martini dan Yuwanto. (2010). Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Terhadap Remunerasi. *Laporan Penelitian*. Universitas Diponegoro. Hlm. 5.

⁶ Diponolo. (1975). *Ilmu Negara Jilid 2*. PN Balai Pustaka. Hlm. 111.

⁷ Muhadam Labolo, *op.cit.*, hlm. 529.

Sedangkan prinsip dari pemerintahan yang demokrasi adalah adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*), supremasi hukum atau pemerintahan berdasarkan hukum (*law supremacy* atau *rule of law*), serta kesederajatan (*equality*) dan kebebasan (*liberty*). Maksud dari pemisahan itu adalah untuk menghindari menumpuknya suatu kekuasaan pada satu tangan, entah itu dalam artian institusi atau pribadi. Sejalan dengan pemisahan kekuasaan, demokrasi juga menjadikan hukum sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku, maka negara demokrasi biasanya diidentikkan dengan negara hukum. Adapun kesederajatan dan kebebasan secara teoritis diartikan sebagai kesamaan hak dari setiap pribadi untuk menikmati kehidupan dan mengejar kebahagiaan⁸.

Pada sistem demokrasi, masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, seperti misalnya ikut serta di dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak suaranya secara bebas tanpa ada campur tangan partai lain untuk mempengaruhi hak suaranya; ikut andil dalam menentukan sebuah kebijakan (masyarakat tidak hanya sebagai objek kebijakan tetapi juga sebagai pengontrol maupun pengawas terhadap pelaksanaan suatu kebijakan).

Apabila pemilihan para pengambil keputusan tingkat tinggi oleh rakyat merupakan esensi demokrasi, maka titik kritis dalam proses demokratisasi adalah digantikannya pemerintah yang dipilih dalam suatu pemilihan yang bebas, terbuka dan adil. Akan tetapi, keseluruhan proses demokratisasi sebelum dan sesudah pemilihan itu biasanya kompleks dan berlangsung lama. Proses itu mencakup pengakhiran rezim nondemokratis, pengukuhan demokratis, dan kemudian konsolidasian sistem yang demokratis⁹. Ketika mencapai tingkat sosial dan ekonomi tertentu, negeri-negeri memasuki zona transisi di mana kemungkinan mereka untuk bergerak menuju demokrasi meningkat dengan nyata. Pengaruh dari luar negeri boleh jadi menimbulkan upaya demokratisasi sebelum negeri-negeri itu mencapai zona itu, atau menghambat atau mencegah terjadinya demokratisasi oleh negeri-negeri yang telah mencapai tingkat perkembangan itu¹⁰.

i. Budaya Politik

Teori tentang budaya politik merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam memahami sistem politik. Budaya politik, kata Almond dan Verba merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap

⁸ *Ibid*, hlm. 530.

⁹ Hantington, Samuel; penerjemah, Asril Marjohan. (1997). *Gelombang Demokratisasi ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 8.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 104.

objek sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat *cognitive*, *affective* dan *evaluative*¹¹.

Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya. Sementara itu, orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Jadi menyangkut *feelings* terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya¹².

ii. Strategi Demokratisasi

Dari berbagai pengalaman, kebangkitan gerakan intelektual dan gerakan arus bawah menuntut demokratisasi sebagai modal awal yang penting dalam mengakhiri kekuasaan otoriter. Akan tetapi, demokratisasi bukanlah sekedar *intellectual enterprise* dan gerakan arus bawah dengan mudah bisa berubah menjadi anarkis. Oleh karena itu, dalam proses yang tiada henti menuju demokrasi, komitmen masyarakat luas untuk berdemokrasi yang pada tingkat pertama justru perlu dibangun. Hal itu hanya mungkin diharapkan manfaatnya jika mengambil bentuk sebagai perjanjian pribadi dan perjanjian sosial yang sifatnya seumur hidup dan terus diperbaharui dari generasi ke generasi. Gerakan demokratisasi yang bersifat musiman, apalagi yang sekedar ditujukan untuk mengakhiri suatu rezim otoriter yang tidak memiliki agenda jangka panjang yang jelas dan disepakati, bukanlah sesuatu yang menjanjikan masa depan yang cerah¹³.

3) Persepsi Mahasiswa Terhadap Demokratisasi

Untuk dapat mengukur bagaimana sikap mahasiswa terhadap sistem politik adalah dengan menggunakan tiga komponen budaya politik menurut Almond dan Verba, yaitu *cognitive* (kognitif), *affective* (afektif) dan *evaluative* (evaluatif). Komponen kognitif untuk menilai tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai jalannya sistem demokrasi di Indonesia. Komponen afektif untuk mengetahui perasaan mahasiswa terhadap aspek-aspek sistem politik yang membuat mahasiswa menerima atau menolak sistem demokrasi di Indonesia. Sedangkan komponen evaluatif orientasi politik ditentukan oleh evaluasi moral yang memang telah dipunyai seseorang. Di sini, norma-norma yang dianut akan menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik¹⁴.

¹¹ Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 99.

¹² *Ibid*

¹³ Mahadam labolo, dkk, *op.cit.*, hlm. 534-535.

¹⁴ Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin. (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 21-22.

Sehingga dengan demikian, mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki intelektualitas, diharapkan dapat menginterpretasikan proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa telah mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai proses demokratisasi melalui pendidikan maupun pengalaman dari orang lain. Melalui pengetahuan yang telah mereka dapatkan, maka mahasiswa memiliki perasaan khusus terhadap sistem politik yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem demokrasi, sehingga mahasiswa dapat memberikan penilaian terhadap proses demokratisasi yang telah berlangsung di Indonesia.

D. Definisi Konseptual

- Persepsi adalah penafsiran atau pandangan terhadap objek tertentu dalam lingkungan berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Persepsi sendiri merupakan hasil dari pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang dirasakan oleh masing-masing individu dalam kehidupan bermasyarakat.
- Demokratisasi adalah suatu proses maupun tahapan menuju demokrasi, yaitu sebuah sistem yang memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat di dalam pelaksanaan kegiatan ketatanegaraan.
- Persepsi mahasiswa FISIP UNDIP terhadap demokratisasi di Indonesia adalah pandangan mahasiswa FISIP UNDIP terhadap pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, dimana kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Pandangan tersebut berdasarkan pada pemahaman mahasiswa FISIP UNDIP terhadap demokratisasi (proses menuju demokrasi) sehingga mahasiswa FISIP UNDIP dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan demokratisasi di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Persepsi mahasiswa FISIP UNDIP terhadap demokratisasi di Indonesia dapat diukur melalui 3 komponen (menurut Almond dan Verba), yaitu:

1. Kognitif

- Pengetahuan mahasiswa FISIP UNDIP terhadap proses demokratisasi di Indonesia.
- Pemahaman mahasiswa FISIP UNDIP terhadap budaya politik di Indonesia
- Sumber informasi pengetahuan dan Penilaian mahasiswa FISIP UNDIP terhadap demokratisasi di Indonesia:
 - Pengalaman dari orang lain
 - Diskusi antar mahasiswa
 - Media massa

2. Afektif

- Ikatan emosional yang dimiliki oleh mahasiswa FISIP UNDIP terhadap demokratisasi di Indonesia.

- Menerima atau menolak sistem demokrasi
- 3. Evaluatif
 - Penilaian mahasiswa FISIP UNDIP terhadap demokratisasi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

G.1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survai.

G.2. Populasi dan Sampel

G.2.1. Populasi

Populasi adalah individu/unit-unit yang menjadi target penelitian. Populasi harus memiliki batasan dan karakteristik sesuai tujuan penelitian¹⁵. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang masih terdaftar sebagai Mahasiswa FISIP UNDIP dan yang masih aktif dalam pelaksanaan perkuliahan.

Dalam penelitian ini, besarnya sampel akan diambil berdasarkan pada perhitungan dengan menggunakan rumus Frank Lynch, yaitu¹⁶:

$$n = \frac{NZ^2 \cdot p(1-p)}{d^2 + Z^2 \cdot p(1-p)}$$

Keterangannya adalah:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

Z = Nilai variabel normal pada penelitian ini, yaitu 1,96 untuk kepercayaan 95%

p = Harga patokan tertinggi yang ditentukan dalam penelitian ini, yaitu 0,5

d = Sampling error dalam penelitian ini yaitu 0,10

Apabila rumus tersebut diaplikasikan, akan diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{3083 (1,96)^2 \times 0,5(1-0,5)}{}$$

¹⁵ Erwan Agus dan Dyah Ratih. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media. Hlm. 37.

¹⁶ Randi Primadia. (2008). Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla Mengenai Penanganan Masalah Kemiskinan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

$$\begin{aligned}
& 3083 (0,1)^2 + (1,96)^2 \times 0,5(1-0,5) \\
= & \frac{3083 (3,8416) \times 0,25}{3083 (0,01) \times (3,8146) \times 0,25} \\
= & \frac{11843,653 \times 0,25}{30,83 \times 0,9604} \\
= & \frac{2960,9132}{29,609132} \\
n = & 100
\end{aligned}$$

Berdasarkan besarnya sampel yang diambil berdasarkan pada perhitungan dengan menggunakan rumus Frank Lynch, maka jumlah mahasiswa yang akan digunakan untuk menjadi sampel penelitian adalah 100 mahasiswa FISIP UNDIP dengan jumlah sampel pada masing-masing jurusannya adalah:

- Administrasi Publik: $631/3083 \times 100$ Mahasiswa = 21 Mahasiwa
- Ilmu Pemerintahan : $694/3083 \times 100$ Mahasiswa = 22 Mahasiswa
- Komunikasi: $792/3083 \times 100$ Mahasiswa = 26 Mahasiswa
- Administrasi Bisnis: $717/3083 \times 100$ Mahasiswa = 23 Mahasiswa
- Hubungan Internasional: $249/3083 \times 100$ Mahasiswa = 8 Mahasiswa

G. Teknik Analisis

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif dimana data kualitatif didukung dengan pengolahan kuantitatif. Mengacu pada penggunaan skala Likert dalam skala pengukurannya, maka analisis dapat dilakukan melalui tahapan membuat tabel kontingensi, untuk mengetahui besarnya jumlah frekuensi jawaban dari mahasiswa yang hanya meminta satu jawaban. Kemudian analisis data dilakukan dengan bantuan program komputer yaitu Program *Statistical Packages For Social Science (SPSS) for Windows Release 16.0*.

H. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Demokrasi yang dianggap merupakan sebuah sistem pemerintahan yang paling baik untuk Indonesia, karena memberikan kedaulatan sepenuhnya terhadap masyarakat, namun ternyata tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap demokratisasi di Indonesia yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dianggap perlu untuk dikaji,

karena masyarakat merupakan aktor utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga perlu diketahuinya persepsi dari masyarakat itu sendiri.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat yang terdidik dalam hal ini diambil sebagai subyek untuk merepresentasikan persepsinya tentang pelaksanaan demokratisasi selama ini di Indonesia. Mahasiswa yang merupakan kaum intelektual dan merupakan penerus bangsa harus dapat memberikan partisipasinya dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, sehingga dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh sebab itu perlu diketahui pandangan mahasiswa terhadap sistem pemerintahan Indonesia, apakah mereka memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah atau justru memiliki keraguan terhadap kinerja pemerintah. Apabila dari mahasiswa itu sendiri memiliki keraguan yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan tata kelola pemerintahan, bagaimana dengan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya peninjauan lebih lanjut terhadap persepsi masyarakat melalui mahasiswa (yang merupakan bagian dari masyarakat) untuk dapat mengutarakan pandangan mereka, guna mendapatkan jawaban agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan menganut sistem demokrasi.

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka temuan penelitian dapat menambah dan memperdalam pengetahuan penulis terhadap demokratisasi di Indonesia. Di samping itu diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemangku kekuasaan untuk dapat melaksanakan demokrasi secara seutuhnya di Indonesia.

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, maka diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Oleh karena sig sebesar $0,031 < 0,05$, maka inferensi yang diambil adalah jurusan mahasiswa berpengaruh terhadap persepsinya tentang demokratisasi di Indonesia. Dengan kata lain, dengan adanya perbedaan jurusan antara masing-masing mahasiswa, maka akan membawa perbedaan pula pada persepsinya tentang demokratisasi di Indonesia.
2. Nilai F sebesar 0,121 dengan signifikansi (sig) sebesar 0,948. Oleh karena sig sebesar $0,948 > 0,05$, maka inferensi yang diambil adalah angkatan mahasiswa tidak berpengaruh terhadap persepsinya tentang demokratisasi di Indonesia. Dengan kata lain, dengan adanya perbedaan angkatan antara masing-masing mahasiswa, maka tidak akan membawa perbedaan persepsinya tentang demokratisasi di Indonesia.
3. Nilai t sebesar 2,269 dengan signifikansi (sig) sebesar 0,025. Oleh karena sig sebesar $0,025 < 0,05$, maka inferensi yang diambil adalah jenis kelamin mahasiswa berpengaruh terhadap persepsinya tentang demokratisasi di Indonesia. Dengan kata lain, dengan adanya perbedaan jenis kelamin antara masing-masing mahasiswa, maka akan membawa perbedaan persepsinya terhadap demokratisasi di Indonesia.

4. Sebagian besar responden (58 persen) memiliki persepsi yang baik dan sangat baik terhadap demokratisasi di Indonesia. Tingginya responden yang memberikan persepsi positif terhadap pelaksanaan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia selama ini dikarenakan beberapa elemen dasar demokrasi ideal sebagaimana diwacanakan dalam teori, dapat diwujudkan oleh masyarakat Indonesia, walaupun masih terkesan dalam tataran instrumentalitanya saja. Namun capaian seperti itu dirasakan sudah cukup bagus, mengingat masyarakat Indonesia sempat mengalami tekanan sosial politis yang sangat hebat di era Orde Baru, di mana pelaksanaan elemen-elemen dasar demokrasi, seperti; HAM, kebebasan pers, penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur, dapat terwujud dalam waktu yang relatif singkat.

Bagi masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia ini, tidak ada sistem yang lebih baik ketimbang demokrasi. Keunggulan demokrasi sangat nyata dan *tangible*. Tidak seperti salah satu sistem lain, yang diklaim “pasti sempurna karena konon buatan Tuhan”. Mengenai kelemahan demokrasi, kita bisa mengatasinya dengan kewaspadaan dan sikap kritis. Contoh di atas mestinya bisa mengajarkan pada masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak-pihak “serigala berbulu domba” yang komitmennya terhadap demokrasi layak dipertanyakan.

Sepertinya negara demokrasi dengan sistem Pemilu yang kita anut adalah rakyat bagaikan memilih kucing dalam karung, di mana rakyat memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang sudah ditentukan oleh partai dari kader-kadernya setelah melalui serangkaian deal-deal untuk mengakomodir kepentingan golongan dan kelompok mereka. Berhubung partai tidak akan pernah bisa dihilangkan dalam dunia demokrasi, maka ke depan salah satu syarat yang utama bagi partai politik untuk mengikuti Pemilu harus lulus audit, baik sumber dana, perekrutan dan kaderisasi yang hasilnya dipublikasikan untuk mendapatkan Sertifikasi Transparan dan Akuntabel, agar dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat dalam memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Lembaga auditor yang ditunjuk oleh Kementrian dalam Negeri dan telah terakreditasi, bisa saja dari dalam dan luar negeri, pentingnya Lembaga auditor dimaksud dikarenakan Partai Politik melalui kader-kadernya yang duduk sebagai pemimpin dan wakil rakyat dapat dikatakan sebagai penyedia jasa untuk mengelola negara supaya menjadi lebih baik.

Pada dasarnya maju atau mundur bangsa kita di masa datang sangat tergantung pada seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu marilah kita aktif ambil bagian dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Partisipasi semua pihak dalam pembangunan sangat diperlukan agar dalam prosesnya tidak menyimpang dari nilai-nilai baik yang telah tertanam dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita.

Faktor pendukung lainnya yang patut dikembangkan dalam kehidupan bangsa kita yaitu budaya musyawarah untuk mufakat. Musyawarah dilakukan guna

mengatasi segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Namun, budaya musyawarah ini harus dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur agar segala persoalan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dipecahkan. Semangat kekeluargaan, gotong-royong, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat yang telah menjadi ciri bangsa dan merupakan cerminan demokrasi Pancasila hendaknya selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat tersebut dapat diterapkan di berbagai lingkungan sosial, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat sampai bangsa dan negara.

Agar budaya demokrasi tumbuh subur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan demokrasi harus sejak awal dikenalkan kepada penerus bangsa. Pendidikan demokrasi dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama pada dasarnya merupakan inti dari demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam keluarga hendaknya selalu dibiasakan menyelesaikan berbagai persoalan dan kepentingan dengan cara musyawarah. Kepala keluarga selalu berusaha menyerap aspirasi, keinginan, kepentingan, atau pendapat dari anggota keluarga, untuk mencapai kata mufakat demi kepentingan seluruh anggota keluarga. Sebagai contoh masalah yang dapat dijadikan bahan dalam musyawarah keluarga yaitu pembagian tugas bagi setiap anggota keluarga. Sebagai kepala keluarga tentunya ayah berperan sebagai pemimpin dalam musyawarah keluarga. Demikian juga di lingkungan masyarakat, segala keputusan menyangkut kepentingan bersama harus dimusyawarahkan agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggota masyarakat.

I. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan hasil kajian, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa menilai bahwa sistem demokrasi sudah sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia (67% responden). Selain itu, mahasiswa juga merasa yakin bahwa demokratisasi yang berlangsung di Indonesia telah terlaksana dengan baik (56% responden) dan sudah sesuai dengan harapan mereka (61% responden). Hal tersebut dapat dilihat dengan keyakinan mahasiswa terhadap adanya rotasi kekuasaan agar terhindar dari pemerintahan yang otoriter (68% responden), pemerintahan yang akuntabel (48% responden), rekrutmen politik yang terbuka (60% responden), pelaksanaan pemilihan umum yang sudah berjalan cukup baik (51% responden).
2. Walaupun demikian, mahasiswa masih kurang yakin bahwa demokratisasi di Indonesia, dimana telah dilaksanakannya masa transisi dan konsolidasi, telah dapat memperbaiki kondisi pemerintahan menjadi lebih baik lagi (63% responden). Hal tersebut dikarenakan mahasiswa kurang dapat merasakan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan pers yang berlangsung di Indonesia (72% responden). Sehingga kesejahteraan tidak dapat dirasakan

secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia dan mengakibatkan kurangnya budaya politik di Indonesia.

3. Mahasiswa menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia, merupakan retorika belaka. Suara rakyat yang merupakan suara Tuhan bagi sistem pemerintahan yang demokrasi, ternyata belum dapat diwujudkan di Indonesia, dikarenakan keputusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ternyata seringkali tidak pro rakyat. Hal tersebut mengakibatkan hingga kini, yaitu 15 tahun setelah masa reformasi, membuat sistem demokrasi belum dapat terwujud secara seutuhnya dan belum dapat memperbaiki kondisi masyarakat secara keseluruhan. Karena seharusnya demokrasi bukan hanya digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, namun juga menjadikan demokrasi sebagai tujuan menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) bagi seluruh bangsa Indonesia.

J. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Memberikan pendidikan sejak dini mengenai sistem pemerintahan terhadap anak-anak bangsa yang merupakan penerus bangsa.
 - b. Memberikan ruang terbuka kepada masyarakat dalam menyuarakan suaranya tanpa adanya pembatasan yang dilakukan oleh aparat hukum.
 - c. Dalam melaksanakan sistem pemerintahan, pemerintah harus dapat lebih transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah dan mengontrol kinerja pemerintah (agar tindak pidana KKN dapat dihindarkan).
2. Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat harus dapat menjadikan demokrasi sebagai *way of life* yang menuntun tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, pemerintahan, dan kenegaraan. Dengan demikian masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek yang berperan pasif dan tidak memiliki peran penting, namun bisa menjadi aktor politik yang dapat berperan aktif di dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
 - b. Masyarakat harus dapat lebih peduli serta berperan aktif dalam sistem politik di Indonesia agar dapat mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah sehingga demokrasi yang seutuhnya dapat diwujudkan melalui budaya politik Indonesia yang partisipan.
3. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa yang merupakan penerus bangsa harus dapat mengobarkan kembali semangat juangnya dalam membela nasib bangsa Indonesia. Sekaligus membangkitkan kembali semangat juangnya dalam memberikan perubahan (*agent of change*) untuk memperbaiki kondisi masyarakat.
- b. Dalam membela nasib rakyat, mahasiswa diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, misalkan dengan tidak melakukan pembakaran maupun perusakan terhadap fasilitas negara. Karena mahasiswa yang merupakan kaum intelektual seharusnya menggunakan intelektualitas mereka, bukannya menggunakan otot mereka untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan rakyat.

K. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang dihadapi oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam teknik pengolahan data yakni tabulating, penulis mengalami kesulitan untuk mengelompokkan data hasil penelitian dan menganalisis hasilnya.
2. Untuk dapat menyamakan persepsi mahasiswa FISIP UNDIP terhadap demokratisasi di Indonesia memiliki berbagai hambatan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan sumber pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa FISIP UNDIP.

DAFTAR PUSTAKA

Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010. Dalam <http://www.bps.go.id> diunduh pada tanggal 18 Mei 2013 pada pukul 21.42 WIB.

Demokrasi Indonesia. Dalam www.courseware.politekniktelkom.ac.id diunduh pada tanggal 4 Mei 2013 pada pukul 16.25 WIB

Muhadam Labolo, dkk. (2008). *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 530.

Azyumardi Azra. Dalam www.republika.co.id diunduh tanggal 16 Mei 2013 pada pukul 17.35 WIB

Taher, Alwin. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Kesadaran Gender*. Dalam <http://repository.ipb.ac.id>. Diunduh pada tanggal 2 Mei 2013 pada pukul 17.25 WIB.

Rina Martini dan Yuwanto. (2010). Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Terhadap Remunerasi. *Laporan Penelitian*. Universitas Diponegoro. Hlm. 5.

Diponolo. (1975). *Ilmu Negara Jilid 2*. PN Balai Pustaka. Hlm. 111.

Hantington, Samuel; penerjemah, Asril Marjohan. (1997). *Gelombang Demokratisasi ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 8.

Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.

Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin. (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 21-22.

Erwan Agus dan Dyah Ratih. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media. Hlm. 37.

Randi Primadia. (2008). Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla Mengenai Penanganan Masalah Kemiskinan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.